

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Juni 2026, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 0,60% (mtm), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,38% (mtm). Secara tahunan inflasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 4,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,92% (yoy). Inflasi Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat inflasi 3,34% (yoy). Sedangkan di wilayah Sumatera, inflasi Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi keempat setelah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi inflasi secara berturut-turut sebesar 5,84% (yoy), 4,79% (yoy), dan 4,70% (yoy). Realisasi inflasi yang tinggi didorong oleh *low base effect* dimana pada Juni 2025 inflasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat 1,32% (yoy) didorong berlangsungnya panen raya komoditas cabai merah dan bawang merah serta terjaganya pasokan daging ayam ras. Secara spasial, seluruh Kota dan Kabupaten IHK yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun tercatat mengalami inflasi yang secara berturut-turut sebesar 4,75% (yoy), 4,95% (yoy), dan 3,55% (yoy).

Adapun komoditas utama penyebab Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2026 terjadi karena didorong oleh kelompok pengeluaran, Inflasi terutama didorong oleh kelompok transportasi sebesar 2,70% (mtm) dengan andil sebesar 0,37% (mtm). Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, dan oli mesin sejalan dengan gejolak geopolitik global yang menekan harga komoditas energi dunia dan berdampak pada sektor transportasi. Selain itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut mengalami inflasi 0,37% (mtm) dengan andil sebesar 0,10% (mtm) dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah, dan bayam sejalan dengan peningkatan biaya logistik pangan. Lebih lanjut, inflasi Juni 2026 turut disumbang oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa yang mengalami inflasi 0,51% (mtm) dengan andil sebesar 0,04% (mtm). Inflasi kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Dengan perkembangan tersebut, pada bulan Juni 2026 perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatat inflasi sebesar 0,60% (mtm), inflasi terjadi karena peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,47 pada Mei 2026 menjadi 113,15 pada Juni 2026. Sementara tingkat inflasi sebesar 1,86% (ytd).

Triwulan II menunjukkan adanya perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2026 secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di 3 Kabupaten/Kota, pada Juni 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 4,67%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,10 pada Juni 2025 menjadi 113,15 pada Juni 2026. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ditandai dengan tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,60 persen.

Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2026

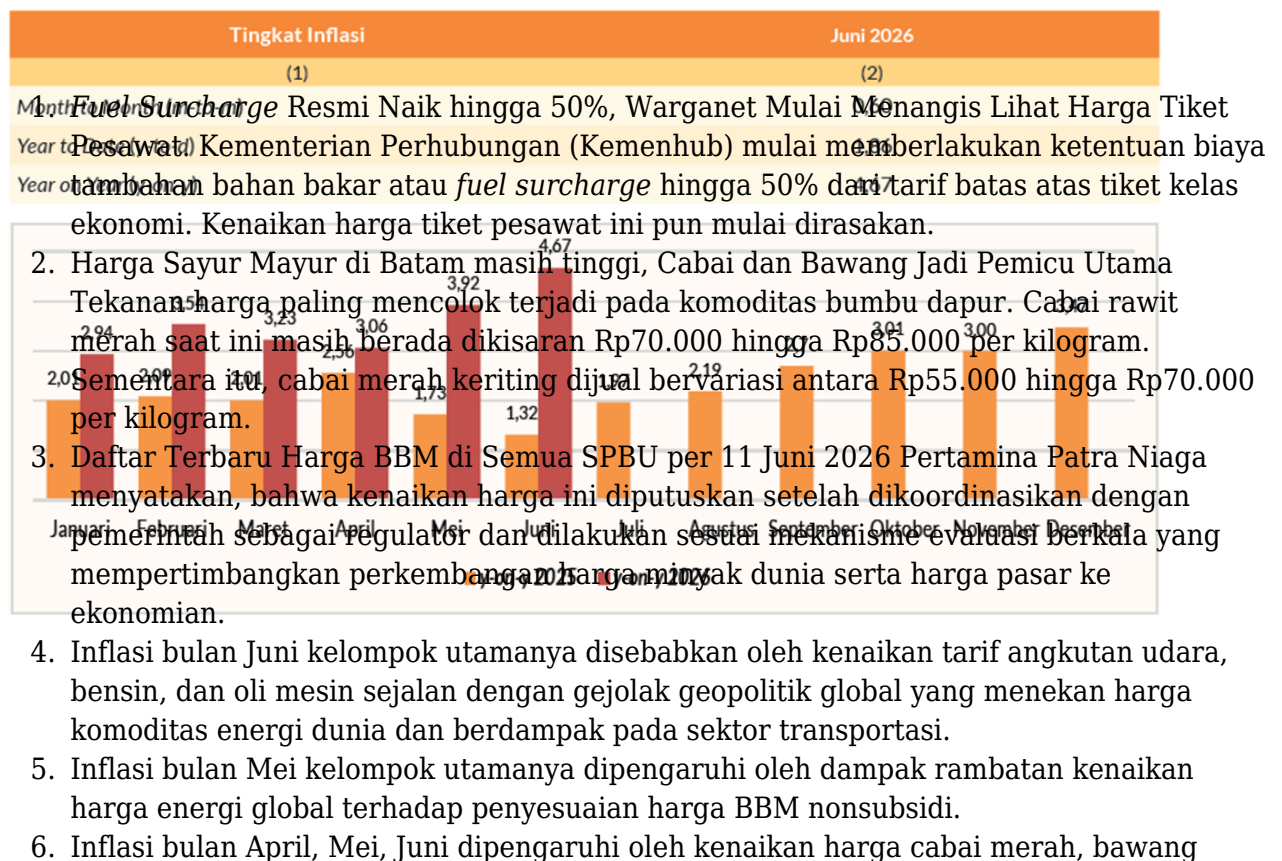
Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2025	IHK Desember 2025	IHK Juni 2026	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2026 ¹ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2026 ² (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2026 ³ (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2026 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	108,10	111,08	113,15	0,60	1,86	4,67	0,60	4,67
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,83	115,90	117,05	0,37	0,99	6,57	0,10	1,90
Pakaian dan Alas Kaki	106,59	107,61	108,23	0,15	0,58	1,54	0,01	0,07
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105,93	106,27	107,34	0,22	1,01	1,33	0,03	0,21
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,76	101,81	103,14	0,41	1,31	1,36	0,02	0,05
Kesehatan	104,93	105,97	106,82	0,06	0,80	1,80	~0	0,05
Transportasi	112,95	115,24	120,92	2,70	4,93	7,06	0,37	0,98
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,91	99,96	101,32	0,15	1,36	1,41	0,01	0,08
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,83	102,42	103,74	0,02	1,29	1,88	~0	0,03
Pendidikan	102,27	103,63	103,74	~0	0,11	1,44	~0	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	105,22	105,89	110,49	0,16	4,34	5,01	0,02	0,48
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	123,34	134,03	136,48	0,51	1,83	10,65	0,04	0,72

Tabel 2. Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, Juni 2026 (Persen)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau, pada April 2026 inflasi sebesar 3,06% (yoy), sedangkan inflasi bulan Juni 2026 sebesar 4,67% (yoy). pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional pada sekitar batas atas kisaran target $2,5 \pm 1\%$.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan II Tahun 2026 antara lain:



merah, dan bayam, tomat, sawi hijau, dan ketimun seiring dengan berakhirnya periode panen raya di wilayah Sumatera bagian utara juga sejalan dengan peningkatan biaya logistik pangan.

7. Kelompok perawatan pribadi dan jasa yang mengalami inflasi 0,51% (mtm) dengan andil sebesar 0,04% (mtm). Inflasi kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan.
8. Deflasi bulan Mei kelompok ini terutama disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan koreksi harga emas global di tengah penyesuaian portofolio investor pada aset keuangan global seperti aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe haven assets*).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II tahun 2026. Beberapa kegiatan di triwulan II ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota tetap terjaga di tengah berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Provinsi Kepulauan Riau melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional Berbagai upaya stabilisasi harga.
3. *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam dan dan Kabupaten Karimun bulan Juni.
4. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
5. Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi.
6. Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah di Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun.
7. Penandatanganan 8 KAD B2B dan 4 KAD G2G antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat. Melalui berbagai upaya serta penguatan sinergi antar daerah, tekanan inflasi diperkirakan menurun dan tetap terjaga dalam kisaran yang stabil.
8. *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang Bulan Mei.
9. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
10. Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi.
11. Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah di Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang. Kabupaten Karimun.
12. *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kepulauan Riau dan kegiatan peningkatan kelembagaan klaster.
13. Pemerintah Kepulauan Riau secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Pemerintah Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Pemerintah Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan Peningkatan produksi pangan di Provinsi Kepulauan Riau.
 3. Pemerintah Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan Peningkatan pelaksanaan pasar murah di Provinsi Kepulauan Riau.
 4. Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada akhir tahun 2026 tetap terkendali.
 5. Peningkatan Produktivitas *Good Agriculture Practice* (GAP) di Provinsi Kepulauan Riau.
 6. Meningkatkan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Risiko dampak rambatan dari kenaikan harga komoditas energi global, yang mulai tercermin dari penyesuaian harga BBM dan LPG non subsidi, tarif angkutan udara, serta peningkatan biaya angkutan logistik.
2. Potensi kenaikan harga pangan seiring berakhirnya musim panen di wilayah Sumatera bagian utara, yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan beberapa komoditas hortikultura.
3. Harga emas kembali menunjukkan tren penguatan setelah sempat terkoreksi pada periode Mei.
4. Prediksi BMKG terkait kondisi El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diperkirakan berlangsung sampai semester II 2026.
5. Risiko dampak rambatan dari kenaikan harga komoditas energi global, yang mulai tercermin dari penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi, tarif angkutan udara, serta peningkatan biaya angkutan logistik.
6. Potensi kenaikan harga pangan seiring berakhirnya musim panen di wilayah Sumatera bagian utara, yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan beberapa komoditas hortikultura.
7. Berlanjutnya normalisasi harga emas perhiasan.
8. Pemerintah Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan meningkatkan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) Serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5+1\%$.
9. Terkendalinya inflasi mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang konsisten serta sinergi kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).